

ISLAM PROFETIK

(Misi Profetis Pesantren Sebagai Sumber Daya Ummat)

Babun Suharto

Institut Agama Islam Negeri Jember
babunsuharto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan yang mengangkat konsep Islam Profetik : Misi Profetik pesantren sebagai sumber daya Umat. Dalam tulisan ini ada tiga pertanyaan penting, yaitu: bagaimana konsep Islam profetik?; bagaimana konsep pesantren?; dan bagaimana konsep profetik dalam pembedayaan Ummat? Metode penelitian dengan menggunakan konsep konten analisis untuk membedah tiga pertanyaan tersebut, hasil dari penelitian ini adalah konsep misi profetik sebagai sumber daya umat, dan konsep profetik dalam pengembangan ummat Islam.

Kata kunci : profetik, pesantren, ummat

Abstracts

This study is a study of the literature that emphasizes the concept of Prophetic Islam: Islamic Prophetic Missions as Community Resources, in this paper there are three important questions: How is the concept of prophetic Islam?; how is the concept of pesantren?; and how is the concept of prophetic in the Ummah edification? By using the content analysis concept to identify the three questions, the results of this study are the concept of prophetic mission as a community resource, and the prophetic concept in the development of the Islamic ummah.

Keyword: prophetic, pesantren, ummah

Pendahuluan

Manusia tidak memiliki kekuatan otot seperti gajah; manusia tidak bisa terbang layaknya burung; manusia tidak mampu berenang sebagaimana ikan; manusia juga tidak bisa lari sekencang kuda. Namun, dengan kecanggihan pikirannya, manusia bisa membuat

mesin-mesin besar yang jauh lebih kuat dari gajah; membuat pesawat terbang yang bisa menjelajah angkasa dan berakselerasi lebih hebat dari burung; membuat mobil atau kereta yang ribuan kali lebih kencang dari kuda; manusia membuat kapal, perahu, dan tank amfibi yang bisa mengarungi

samudera luas. Itulah manusia yang diberi kelebihan oleh Allah berupa akal pikiran, dan karenanya Allah menunjukkan sebagai khalifah di muka bumi (*khalifatullah fi al-ard*).

Daya yang menjadikan manusia memimpin dunia adalah akal pikirannya. Tanpa itu, manusia tidak akan menjadi memimpin. Bahkan, bisa jadi manusia yang dipimpin oleh binatang yang secara fisik lebih kuat daripada manusia. Daya manusia itulah yang harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga posisi pemimpin masih bisa disandang di pundaknya.

Di paper ini, penulis mamilih menggunakan istilah Sumber Daya Umat (SDU) bukan SDM. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan di sini. *Pertama*, jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, yang diperkirakan berjumlah 90 persen. Jika sumber daya umat mayoritas ini bisa dikembangkan secara optimal, maka bangsa Indonesia dengan sendiri akan menjadi bangsa yang maju. *Kedua*, fokus paper ini adalah seputar pendidikan pesantren, di mana orang-orang yang ada di dalamnya beragama Islam. Pengembangan pesantren pada hakikatnya merupakan pengembangan (sebagian) umat muslim, kendati pesantren dalam banyak hal juga bermanfaat bagi masyarakat dan negara secara umum. *Ketiga*, dalam konteks globalisasi, umat Islam dipandang sebagai umat yang berpotensi menjadi kompetitor Barat. Setidak-tidaknya itulah tesis yang diajukan Samuel Huntington dalam bukunya *The Clash of Civilization*. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dituntut menunjukkan kepada dunia bahwa SDU muslim Indonesia benar-benar layak berkiprah di jagad global. Karenanya, pengembangan SDU muslim mutlak

dilakukan secara baik, sistematis dan komprehensif.

Dengan demikian, Sumber Daya Umat (SDU) adalah segenap energi, potensi, bakat, kemampuan, dan keterampilan umat muslim yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bangsa, negara dan agama dalam bingkai tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah.

Potret Sumber Daya Ummat Muslim Indonesia

Tinggi rendahnya SDU muslim Indonesia bisa dilihat dari Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index, HDI*) negara Indonesia secara umum. Jika HDI Indonesia tinggi, maka SDU muslim juga tinggi. Sebaliknya, jika HDI Indonesia rendah, maka bisa dipastikan bahwa SDU muslim Indonesia juga rendah. Alasannya, sebagaimana dikemukakan di atas, umat muslim Indonesia dalah mayoritas negeri ini. Kualias SDU mereka menjadi cerminan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara umum.

Laporan United Development Program (UNDP) dapat dijadikan acuan untuk melihat mutu manusia Indonesia dibandingkan negara-negara lain, yang terangkum dalam Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari 177 negara, posisi Indonesia berada pada ranking 111. Parameter untuk menilai mutu manusia dibagi dalam empat faktor yaitu, *Life Expectancy at birth* (LEB); yaitu angka harapan hidup, *Adult literacy rate* (ALR); yaitu persentase anak umur 15 tahun atau lebih melek huruf, *Combined primary, secondary and tertiary gross enrollment ratio* (CGER) atau Angka Partisipasi Kasar

(APK), yaitu rasio murid/mahasiswa yang terdaftar, dan *Gross Domestic Product* (GDP), yaitu Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dari laporan UNDP pada tahun 2006 dapat dilihat indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2004 sebagai berikut:

Negara	HD I	LEB (tahun)	AL R (%)	CGE R (%)
Singapura	0.916	78.9	92.5	87.3
Korea Selatan	0.912	77.3	98.0	95
Filipina	0.763	70.7	92.6	81.5
Indonesia	0.711	67.2	90.4	68.4

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004 (Sumber: Prima Roza, 2007: 303)

Data di atas menunjukkan kepada kita bahwa kualitas SDU muslim Indonesia tertinggal. Jangankan dengan Singapura dan Korea Selatan, dengan negara Filipina saja kita masih kalah.

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya diperbincangkan di negeri ini, sebab ia bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Selain itu, kemiskinan umumnya berbanding lurus dengan pengangguran, yang pada gilirannya akan menambah jumlah orang miskin dan pengangguran baru. Kemiskinan juga berdampak pada hilangnya aset ekonomi yang dimiliki keluarga karena terpaksa digunakan untuk sekedar bertahan hidup.

Kategori kemiskinan sendiri bervariasi. World Bank, misalnya, seperti

dikutip Fuad Bawahir, membagi kemiskinan menjadi tiga jenis. *Pertama*, kemiskinan absolut atau super miskin adalah mereka yang berpendapatan perkapita kurang dari satu dolar AS per hari. Artinya, suatu rumah tangga tidak dapat memenuhi *basic need*-nya untuk bertahan hidup. *Kedua*, kemiskinan moderat didefinisikan sebagai orang yang berpenghasilan kurang dari dua dolar AS per hari. *Terakhir*, kemiskinan relatif adalah mereka yang pendapatannya di bawah angka rata-rata.

Oleh karena itu, yang mutlak dilakukan saat ini adalah meningkatkan kualitas SDU muslim. Ini sejalan dengan salah satu misi utama Rasulullah saw. diutus ke dunia adalah dalam rangka peningkatan kualitas SDU yang sepenuhnya, tidak hanya pemenuhan secara jasmaniyah tapi juga secara rohaniyah (batiniyah). Peningkatan kualitas SDU oleh Nabi saw. tersebut selaras dengan misi profetis Nabi, yaitu untuk mendidik manusia, memimpin mereka ke jalan Allah swt., dan mengajarkan untuk berbuat adil, mencapai kemakmuran, kebahagiaan, sehat, harmonis secara material dan spiritual.

Dengan demikian, misi Nabi mengandung pengertian akan pentingnya kualitas SDU yang didasarkan pada adanya keseimbangan: beriman, berilmu (ber-iptek) dan beramal; cakap baik secara lahiriyah maupun batiniyah; berkualitas secara rasional dan emosional, atau memiliki EQ (*emotional quotient*), IQ (*intellectual quotient*), dan SQ (*spiritual quotient*) yang tinggi. Krisis dalam SDU terjadi ketika harmoni semacam ini tidak lagi dipertimbangkan dan diperlukan,

sebagaimana yang seringkali terjadi pada dunia pendidikan modern.

Kita bisa menyepakati pandangan Azzumardi Azra, yang baru-baru pada Oktober 2010 lalu memperoleh gelar kehormatan dari Ratu Belanda sehingga berhak menyandang gelar "Sir". Dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium*, dia menyatakan bahwa keunggulan yang mutlak dimiliki bangsa ini dalam menghadapi globalisasi adalah penguasaan sains-teknologi dan keunggulan kualitas sumber daya umatnya. Penguasaan terhadap sains-teknologi, sebagaimana terlihat dalam pengalaman banyak negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan sebagainya, menunjukkan bahwa sains-teknologi merupakan salah satu faktor terpenting yang mengantarkan negara-negara tersebut pada kemajuan. Kemajuan dan penguasaan atas sains-teknologi mendorong terjadinya percepatan transformasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah "pembangunan".¹

Selaras dengan pandangan Azra, Djuwariyah² mengusulkan empat karakteristik SDU yang diperlukan dalam konteks globalisasi: (1) Manusia yang berwatak, yaitu jujur dan memiliki *social capital*: dapat dipercaya, suka kerja keras, jujur, dan inovatif. Dengan istilah lain, manusia yang beretika dengan taat menjalankan ajaran agamanya; (2) Cakap dan inteligen; inteligensi ini harus

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium*, Ciputat: Kalimah, 2001, hlm: 46.

² Djuwariyah, "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Islam," Yogyakarta: Jurnal El-Tarbawi No. 1 Vol. I, 2008, hlm: 17.

dikembangkan sesuai apa yang dimiliki oleh masing-masing individu; (3) *Entrepreneur* (wiraswasta). Sikap *entrepreneur* bukan hanya di bidang ekonomi dan bisnis tetapi juga unruk semua aspek kehidupan, karena kemampuan *entrepreneur* cenderung bersifat inovatif dan tidak terikat kepada sesuatu yang tetap, sehingga tidak mengenal istilah "menganggur"; (4) Kompetitif, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang memiliki kualitas kompetitif dalam kehidupan dunia terbuka untuk selalui menggapai nilai lebih dan meningkatkan kualitas produktivitas kerjanya. Sikap kompetitif harus sudah mulai ditumbuhkan sejak di dalam keluarga, dan juga setiap jenjang pendidikan formal.

Untuk mencapai itu, menurut,³ Indonesia memiliki sejumlah modal dasar yang memadai untuk mewujudkan cita-cita ini. Di antara modal dasar terpenting adalah kenyataan bahwa rakyat dan bangsa Indonesia adalah amat agamis, yang sangat menghormati ajaran-ajaran agama.

Posisi Pesantren Dalam Pengembangan Sumber Daya Ummat

Sebelum mengurai posisi strategis pesantren dalam pengembangan SDU muslim Indonesia, penting sekali untuk dideskripsikan pengertian pendidikan Islam. Pengertian itu bisa dijadikan sebagai pijakan awal tentang posisi pesantren dalam pengembangan SDU muslim. Di dalam Laporan Hasil *World Conference on Muslim Education* yang pertama di Mekah tanggal 31 Maret sampai 8 April 1977, disebutkan:

³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium*, Ciputat: Kalimah, 2001, hlm: 47-48.

*“Education should aim at balanced growth on the total personality on man through the training of man’s spirit, intellect, the rational self, feeling, and bodily senses. Education should therefore cater for the growth of man in all aspects: spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic both individually and collectively and motivate all these aspects toward goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large”.*⁴

“Pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan kepribadian total manusia secara seimbang melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, dan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan bagi manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, linguistik, baik secara individual maupun kolektif, dan memotivasi semua aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan muslim Muslim terletak pada realisasi kepasrahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya.”

Berdasarkan kutipan di atas, pendidikan Islam ternyata memiliki *tujuan antara* dan *tujuan akhir*.⁵ *tujuan antara* adalah tujuan yang pertama-tama hendak dicapai dalam proses pendidikan Islam. Tujuan itu menyangkut perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam proses pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi peserta didik, masyarakat, maupun lingkungannya. Sedangkan *tujuan akhir* adalah tujuan puncak yang ingin dicapai oleh melalui pendidikan Islam, yaitu ketakwaan kepada Allah swt yang diwujudkan dalam kehidupan personal, sosial, maupun kemanusiaan.

Mohammad al-Toumy al-Syaibany membagi *tujuan antara* menjadi tiga jenis. *Pertama*, tujuan individual, yaitu tujuan yang menyangkut perubahan-perubahan yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, pertumbuhan kepribadian dan persiapan peserta didik dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirar. *Kedua*, tujuan sosial, yaitu tujuan yang menyangkut perubahan-perubahan yang dikehendaki pada fase-fase pertumbuhan, pengayaan pengalaman, dan kemajuan peserta didik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, tujuan profesional, tujuan yang berkaitan dengan pendidikan sebagai ilmu, seni, profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas lain yang ada di dalam masyarakat.

Yang patut disorot dari tujuan di atas adalah tidak adanya unsur atau semangat dikotomik dalam pengertian dan tujuan pendidikan Islam. Bahkan, pemetaan tujuan profesional yang dikemukakan al-Syaibany semakin

⁴ Langgulung, Hasan, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm: 308.

⁵ Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, hlm: 6-7.

mempertegas bahwa umat muslim dituntut menguasai ilmu pengetahuan apa saja - bukan hanya pengetahuan agama sebagaimana asumsi sejumlah pihak selama ini - dan sekaligus memiliki skill yang berkualitas sehingga bisa eksis dalam percaturan sosial, ekonomi, politik, dan sains-teknologi baik di lingkup lokal, nasional, maupun global.

Data tahun 2004 menunjukkan bahwa ada 12.000 lebih pesantren tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung dalam *Rabithah Ma'ahid al-Islah*. Dengan jumlah sebanyak itu, keberadaan pesantren sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pendidikan mendapat penguatan dari UU Sisdiknas 2003, yang menjelaskan: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Pesantren sebagai bagian dari pendidikan Islam harus senantiasa memerankan fungsi dan misi profetis di atas dalam peningkatan kualitas SDU-nya, baik dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam hal karakter, sikap moral, penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Dengan kata lain, pesantren secara ideal harus berfungsi dan berperan membina dan menyiapkan santri yang berilmu, berteknologi, berkecakupan tinggi, dan sekaligus beriman dan beramal soleh. Pesantren harus mampu mengejar ketertinggalan-ketertinggalan dalam menyiapkan SDU

yang berkualitas. Juga tidak kalah pentingnya dari itu semua adalah pesantren harus mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang terus muncul di tengah masyarakat sebagai konsekuensi dari lajunya perubahan yang terus menerus. Untuk itu, tidak ada alternatif lain, kecuali penyiapan SDU yang berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian dan ketrampilan. Hanya dengan tersedianya kualitas SDU yang berkualitas tinggi itu, Indonesia bisa *survive* di tengah pertarungan ekonomi dan politik yang terus kian kompetitif.

Dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian standar kualitas mutu pendidikan pesantren dalam rangka mencetak SDU berkualitas, maka harus dilakukan upaya perubahan paradigma, antara lain: 1) melaksanakan program menjadi merumuskan/melaksanakan program, 2) keputusan terpusat menjadi keputusan bersama/partisipatif, 3) ruang gerak terbatas menjadi ruang gerak fleksibel, 4) sentralistik menjadi desentralistik, 5) individual menjadi kolektif, 6) basis birokratik menjadi basis profesional, 7) diatur menjadi mandiri, 8) malregulasi menjadi deregulasi, 9) informasi terbatas menjadi informasi terbuka, 10) boros menjadi efisien, 11) pendelegasian menjadi pemberdayaan, dan 12) organisasi vertikal menjadi organisasi horizontal.

Menurut Nurcholish Madjid, dalam buku *Islam Kerakyatan dan Keindonesia*, ada dua misi yang harus menjadi pemikiran yang sangat mendasar bagi kalangan pesantren. *Pertama*, bagaimana menyuguhkan kembali pesan moral yang diembannya kepada masyarakat abad ini begitu rupa sehingga tetap relevan dan memiliki

daya tarik. Tanpa relevansi dan daya tarik itu, efektivitas tidak dapat diharapkan. *Kedua*, masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan modern, yaitu bagaimana menguasai sesuatu yang kini berada di tangan orang lain (Barat).⁶

Dengan demikian, keunggulan SDU yang ingin dicapai pesantren adalah terwujudnya generasi muda yang berkualitas tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Tetapi sesuai dengan sifat distingtifnya sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang mempunyai subkultur yang distingtif pula,⁷ pesantren harus lebih mengorientasikan peningkatan kualitas santrinya ke arah penguasaan ilmu-ilmu agama Islam. Karena bagaimanapun, sampai sekarang ini pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling efektif dalam melakukan transmisi dan transfer ilmu-ilmu agama Islam.

Strategi Pesantren Dalam Pengembangan Sumber Daya Umat

Dalam kenyataannya, pesantren sebagai subkultur merupakan lembaga pendidikan dan sosial yang mewujudkan proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional, karena secara historis, pesantren bukan hanya bernuansa keislaman, tetapi juga merupakan salah satu bentuk *indigenous culture* Indonesia yang mempunyai potensi sosial paling ideal sebagai *agent*

of change terhadap budaya masyarakat, yang begitu dinamis. Meskipun pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan *indigenous* Indonesia, tradisi keilmuan pesantren dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional di kawasan dunia Islam lainnya.⁸ Dengan demikian, pada dasarnya pesantren tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dalam peran sertanya untuk membangun bangsa dan negara.

Perspektif historis menempatkan pesantren pada posisi yang cukup istimewa dalam khazanah perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia –sebagaimana disebutkan di atas, adalah bukan sekedar basa-basi namun fenomena riil. Kiranya tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid menempatkan pesantren sebagai subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pesantren, jika diposisikan sebagai satu elemen diterminan dalam struktur piramida sosial masyarakat Indonesia, adalah hal yang wajar dan proporsional.

Posisi penting yang dimiliki pesantren di Indonesia menuntutnya untuk dapat berperan aktif dalam setiap proses-proses pembangunan sosial baik melalui potensi pendidikan maupun potensi pengembangan masyarakat yang dimilikinya. Seperti diketahui, bahwa pesantren selama ini dikenal dengan fungsi dan misi profetisnya sebagai lembaga pendidikan untuk membebaskan santrinya dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan, yang selama ini menjadi musuh dari dunia pendidikan secara umum. Selanjutnya, keberdayaan para santri dalam

⁶ Mudjia Rahardjo (ed.), *Quo Vadis Pendidikan Islam Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*, Malang: UIN Malang Press, 2006, hlm: 54.

⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium*, Ciputat: Kalimah, 2001, hlm: 48.

⁸ Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, hlm: 87.

menguasai ilmu pengetahuan dan keagamaan akan menjadi bekal mereka dalam berperan serta pada proses pembangunan yang pada intinya tiada lain adalah perubahan sosial menuju terciptanya tatanan masyarakat yang lebih sempurna.

Melalui UU Sisdiknas tahun 2003, kedudukan pendidikan Islam, termasuk di dalamnya pesantren, telah menemukan momentumnya untuk diposisikan sejajar atau sama derajatnya dengan sekolah-sekolah negeri yang selama ini mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak lagi adanya skat dan batas-batas pemisah baik secara psikologis maupun sosial, antara pendidikan umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag). Walaupun masih saja kita rasakan adanya beban terjal psikologis dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan kedua departemen tersebut, tapi kondisi saat ini sudah lebih baik jika dibanding dengan kondisi masa-masa Orde Baru. Hal ini barangkali masih membutuhkan waktu untuk berbenah.

Tetapi, ada permasalahan baru yang dihadapi pesantren saat ini, khususnya yang menyangkut persoalan intern pesantren dengan elit-elitnya. Di saat Orde Baru tumbang oleh kekuatan reformasi, kebebasan berotonomi dalam berbagai aspek seakan telah menemukan momentumnya. Hal ini juga juga berimbas pada otonomi sistem pendidikan pesantren, tanpa harus melalui kontrol ketat sebagaimana yang pernah terjadi pada saat Orde Baru berkuasa. Kondisi demikian mestinya semakin membawa prospek segar akan

keberlangsungan pesantren di masa-masa akan datang.

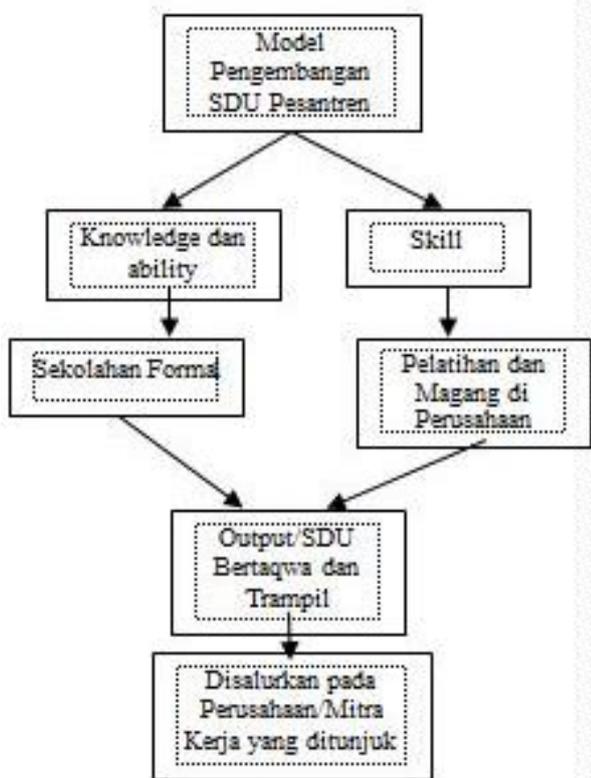
Di satu sisi, di era otonomi, pesantren telah melakukan lompatan-lompatan dalam pemenuhan hajat hidupnya dan lebih bisa leluasa dalam mengenalkan program-programnya untuk kepentingan masa depan, dengan melakukan inovasi-inovasi pada berbagai aspeknya. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak dapat menutup mata, dengan semakin banyaknya pesantren yang mengalami "dekulturisasi" dan "detradisasi", dan bahkan meninggalkan peran dan fungsi profetisnya, yaitu peningkatan kualitas SDU melalui penanaman nilai agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagai lembaga dakwah.

Disinyalir faktor dominan sebagai penyebab itu semua adalah pudarnya idealisme kyai yang menjadi figur sentralnya. Kiai telah banyak disibukkan dengan urusan-urusan praktis pragmatis bahkan politis, dan seringkali terlibat dalam dukung-mendukung terhadap proses Pilkada. Dalam kaitan ini, kyai sebagai simbol struktur sosial barangkali juga perlu ditempatkan secara wajar dan proporsional. Peran kyai dalam percaturan kehidupan tidak hanya sebagai guru agama di pesantren semata, namun juga harus berperan dalam proses-proses pembangunan masyarakat lebih luas; maka langkah politik yang diambilnya ketika proses-proses pembangunan itu terjadi, kyai tidak bisa serta-merta meninggalkannya, misalnya melalui pemilihan-pemilihan kepala daerah tersebut.

Khusus mengenai penyiapan SDU pesantren yang nantinya diharapkan bisa membawa angin segar perubahan, sehingga *output* yang dihasilkan benar-benar profesional dan kompetitif di

tengah tuntutan zaman yang semakin kompleks ini, paling tidak ada beberapa langkah integratif; yang merupakan gabungan antara teori dan praktek. Semua ini dilakukan dalam rangka penyiapan sumber daya santri yang handal dan professional. Tawaran model pengembangan sumber daya tersebut secara integratif dapat dilihat pada bagan berikut.

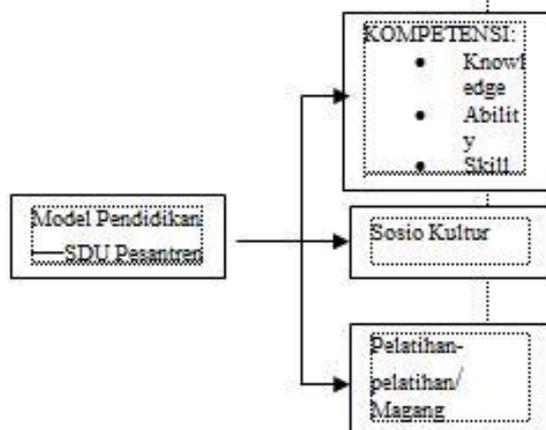
Bagan I
Model Pengembangan SDU di Pesantren



Bagan I di atas menunjukkan bahwa model pengembangan SDU pesantren harus mengacu kepada dua model pengembangan, yaitu berupa pemberian bekal secara teoritis yang berupa *knowledge* (pengetahuan) dan *ability* (kemampuan). Kedua hal ini dapat ditempuh melalui pendidikan formal (sekolahan). Sedangkan model pengembangan kedua berupa pemberian

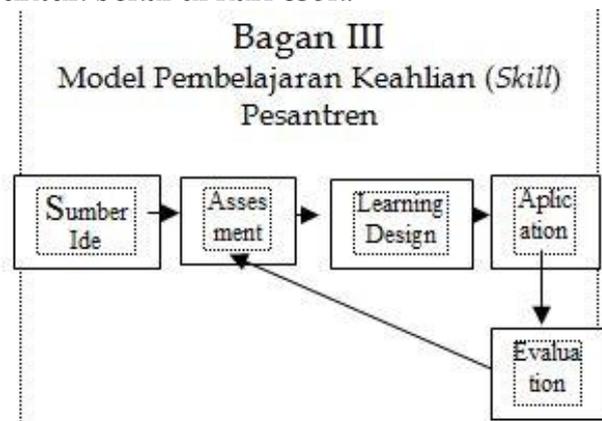
semacam bekal ketrampilan hidup (*life skill*), dengan cara pelatihan dan magang di perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk sebagai mitra kerja pesantren. Dengan model pengembangan integratif seperti ini, diharapkan output (SDU) yang dihasilkan menjadi beriman, bertaqwa, berilmu, dan terampil; sehingga mereka siap disalurkan ke berbagai perusahaan/mitra kerja yang telah ditunjuk untuk mengaplikasikan segala kemampuan yang dimilikinya.

Bagan II
Model Pendidikan – SDU Pesantren



Bagan II menunjukkan tentang model pendidikan menuju SDU pesantren handal dan professional. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan penguatan-penguatan materi pendidikan yang memuat *knowledge, ability dan skill*. Juga tidak boleh dilupakan dalam model pendidikan ini adalah senantiasa memberikan penguatan-penguatan materi yang tidak terlepas dari kontekstualisasi sosio-kultur Indonesia, sebab pesantren yang berkembang di Indonesia merupakan *indigeneous culture* (kultur asli) Indonesia. Secara integratif juga dilakukan pelatihan-pelatihan dan magang di berbagai instansi/tempat

yang dapat menunjang pendidikannya untuk bekal di hari esok.



Adapun model pembelajaran keahlian (*skill*) yang harus dipilih pesantren, sebagaimana ditunjukkan pada bagan III di atas, harus melalui proses-proses yang dimulai dari munculnya sumber ide, kemudian dilakukan *assesment* (pendampingan), kemudian disusun desain pembelajaran secara matang. Untuk selanjutnya diaplikasikan secara benar. Yang terakhir dilakukan evaluasi secara menyeluruh, terkait apakah proses yang dijalankan sesuai dengan rencana atau belum. Jika belum sesuai dengan rencana, maka harus dilakukan lagi, begitu seterusnya; sehingga ditemukan model pembelajaran yang pas dan sesuai harapan.

Membincang kiai pasti berkaitan dengan institusi pesantren. Dan berbicara pesantren tidak akan terlepas dari organisasi sosial-keagamaan bernama Nahdlatul Ulama (NU), sebab yang menggerakkan Jam'iyah NU, khususnya di Jawa, kebanyakan adalah para kiai pengasuh pesantren. Jadi, kiai, pesantren dan NU adalah tiga entitas yang sulit dipisahkan. "NU dan pesantren seperti ikan dan air," kata Ayu Sutarto, seorang budayawan nasional dan pemerhati NU. Karena itu, institusi NU menjadi bagaian dalam uraian

reposisi kiai dari politik ke pemberdayaan umat.

Dari Politik Ke Pemberdayaan Umat

Relasi kiai, santri dan politik memang telah mengalami perubahan. Dewasa ini sekurang-kurangnya sudah terdapat kesadaran di dalam kerangka referensi yang menempatkan kiai dalam tataran fungsi khusus. Memang semakin rasional sebuah masyarakat akan semakin menempatkan dirinya di dalam mindset diferensiasi struktur spesialisasi fungsi. Penempatan kiai pun telah menggunakan logika seperti itu. Kiai dengan fungsi utamanya adalah sebagai guru spiritual dan pembimbing umat di dalam kehidupan keagamaan maka posisi kiai juga ditempatkan di situ. Jika kiai kemudian memasuki kawasan dunia politik, maka posisi utama kiai pun berubah ke arah tersebut.

Jika menggunakan konsepsi pusat-pinggiran, maka perubahan posisi tersebut akan menempatkan perubahan posisi kiai dari posisi pusat –sebagai guru spiritual– ke arah pinggiran yang disebabkan posisi pusat telah ditenpati oleh posisioningnya sebagai politisi. Makanya tidak mengherankan jika kemudian terdapat perubahan kepatuhan ketika seorang kiai berubah posisinya tersebut. Dalam hal ini, maka posisi kiai akan tetap ditaati ketika kiai dimaksud berada di dalam posisi pusat sebagai guru spiritual dan kurang atau bahkan tidak ditaati ketika posisi tersebut berubah menjadi pinggiran. Kiai yang memasuki dunia politik berarti telah meminggirkan posisinya dalam kawasan keagamaan dan kemudian posisi sentralnya digantikan oleh dunia politik.

Perbedaan afiliasi politik kiai juga bukan mustahil menimbulkan respon beragam dari komunitas masyarakat

yang sebelumnya menempatkan kiai sebagai *opinion leader* ataupun referensi utama pengambilan keputusan yang harus ditaati. Situasi ini potensial menjadikan kiai dalam konotasi dan lingkup pengaruh kulturalnya yang khas, sebagaimana identifikasi Mastuhu, Zamakhsyari Dhofir ataupun Bruinessen, berubah dari sebelumnya. Bahkan bukan mustahil sebagian masyarakat yang semula senantiasa menggantungkan sikap politiknya pada kehendak kiai telah kehilangan respektasinya karena perbedaan sikap politik. Apalagi sudah jamak diketahui bahwa dalam beberapa kasus afiliasi politik kiai sering kali disertai dengan fasilitas tertentu yang lebih banyak dinikmati kiai dan keluarganya, sementara manfaat yang sama kurang dinikmati para pengikutnya.

Tanpa berpolitik, kiai sesungguhnya dapat berperan lebih strategis dalam perpolitikan di tingkat lokal maupun nasional. Kiai bisa (dan harus benar-benar) berjuang untuk mengkampanyekan dan menegakkan politik moral. Politik moral jangan sekedar dijadikan jargon. Ia wajib dibuktikan dalam tindakan. Tantangan terberat dalam upaya penegakan politik moral adalah pragmatisme politik, bukan hanya di kalangan elit tetapi juga di masyarakat *grass root*. Adalah satu kenyataan bahwa sebagian masyarakat cenderung memilih calon tidak didasarkan kepada visi, misi dan programnya. Sebaliknya, pilihan dijatuhkan karena pertimbangan materi dan uang semata. Apa yang disebut dengan *money politics* itu benar-benar telah menggurita. Ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di tanah air, sekaligus ancaman bagi terciptanya *good government* dan *clean governance*.

Di saat krisis finansial, krisis pangan, krisis ekologi, krisis moral, dan krisis segalanya, kiai seyogyanya menjadi salah satu aktor restorasi bangsa ini. Akan tetapi, fenomena di sejumlah daerah, justru banyak kiai yang menceburkan dirinya ke dalam kubangan politik praktis, yang identik dengan trik-trik kotor, cara-cara culas, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Kiai yang identik dengan kealiman dan kesantunannya terlihat tidak ada bedanya dengan para politisi lain yang bisa dikatakan “tidak religius”. Masyarakat menjadi bingung apakah dengan perilaku kiai yang semacam itu. Tak heran manakala masyarakat sering bergumam, “Menjadi mantan politisi menjadi kiai, daripada mantan kiai menjadi politisi.”

Slamet Efendi Yusuf, salah satu kandidat kuat pada Mukatamar ke-32 menegaskan bahwa program-program yang menyentuh umat secara langsung seperti pendidikan, kesehatan, dakwah, pengembangan sumber daya umat, dan advokasi rakyat kecil merupakan pekerjaan rumah yang mendesak untuk dilakukan NU ke depan. Artinya, NU harus kembali ke Khittah-nya sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi sosial politik.

Basis epistemologis keterlibatan kiai adalah kesadaran historis bahwa agama Islam bukanlah wilayah yang kosong dan sunyi sepi sendiri. Problem di sektor ekonomi bukanlah masalah yang melulu bersifat sekuler dan berseberangan secara diametral dengan masalah-masalah keagamaan. Mesti ada pemahaman bersama bahwa krisis finansial adalah problem religius yang menuntut perhatian serius bersama.

Untuk itu, kiai, pesantren dan NU harus memiliki kemauan yang benar-

benar serius untuk mengembangkan SDU muslim. Kalau kemauan ini tidak ada, gagasan dan teori apapun yang dikemukakan tidak akan dapat melahirkan tindakan. Hal ini, antara lain, ditunjukkan dengan pengelolaan secara profesional lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Para kiai tidak perlu segan untuk belajar kepada organisasi-organisasi keagamaan lain yang lebih berhasil mengelola lembaga pendidikan. Dengan demikian, lembaga pesantren, madrasah, dan lembaga-lembaga yang dikelola oleh kiai atau berada di bawah naungan NU mampu mencetak lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan dengan pengetahuan yang tinggi, skill yang mumpuni dan akhlak yang mulia.

Link And Match Kurikulum Pesantren: Menyeimbangkan Kitab Kuning Dan Kitab Putih

Persoalan pendidikan yang selalu menjadi sorotan adalah kurikulum. Ini tidak berarti bahwa dimensi-dimensi pendidikan lainnya menjadi tidak penting untuk diperbincangkan. Sorotan tajam pada kurikulum tidak lepas dari asumsi bahwa kurikulum merupakan domain inti (*core domain*) dalam proses belajar mengajar. Lebih dari itu, kurikulum diyakini sangat menentukan terhadap corak *out put* pendidikan suatu negara. Parahnya, setiap kali ada masalah sosial, misalnya: maraknya korupsi, kekerasan, dekadensi moral, konflik SARA, dan lain-lain, maka yang kena getahnya adalah kurikulum. Para pemikir kemudian beramai-ramai mengusulkan perubahan isi kurikulum. Di antaranya, ada yang menginginkan perlunya memasukkan anti korupsi, wawasan multikulturalisme, dan anti

terorisme dalam kurikulum pendidikan kita.

'Gonta-ganti' kurikulum sebenarnya bukan hanya terjadi di negara dunia ketiga seperti Indonesia. Negara yang sudah maju (*developed country*) seperti Amerika Serikat juga mengalami hal serupa. Setidak-tidaknya itulah yang diungkapkan oleh George A. Beauchamp dalam bukunya "*Curriculum Theory*".⁹ Beauchamp mengungkapkan bahwa setiap kali ada *tuntutan* (cetak miring dari penyusun) transmisi elemen budaya tertentu terhadap generasi muda, maka elemen tersebut acapkali menjadi materi kurikulum baru sekolah. Sayangnya, kata Beauchamp, masuknya materi itu tidak dibarengi dengan definisi yang jelas mengenai perubahan peran sekolah yang menuntut dimasukkannya beberapa materi kurikulum baru.

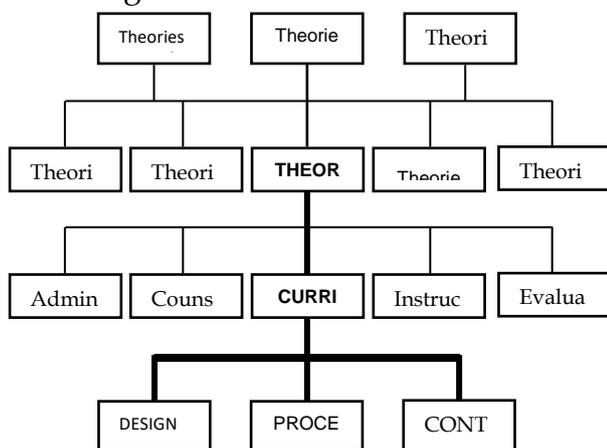
Padahal, belajar adalah rencana dan petunjuk. Smith mengakui bahwa definisi ini memang terbatas pada konteks sekolah.¹⁰ Untuk itu, rumusan pendekatan-pendekatan teori kurikulum yang diajukan Smith di sini harus dipahami dalam bingkai "sekolah". Jika dikaji lebih dalam lagi, sebenarnya apa yang dirumuskan Smith tidaklah berlebihan. Pasalnya, istilah kurikulum ada pada lembaga formal seperti sekolah dan sejenisnya. Maksud saya, pendidikan yang tidak terjadi di sekolah mayoritas tidak memiliki kurikulum. Pendidikan berjalan secara alamiah dan

⁹Beauchamp, George A., *Curriculum Theory*, 2nd edition, The KAGG Press, Illions, 1968, hlm: 1-2.

¹⁰ Smith, Mark K., *Curriculum Theory and Practice*, Dokumen [www. Tersedia di http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm](http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm), hlm: 2.

di dalamnya tidak ada proses rekayasa.¹¹ Dalam hal ini, pendekatan-pendekatan teori kurikulum menjadi empat bagian, yaitu: 1) kurikulum sebagai silabus yang akan ditransmisikan kepada peserta didik, 2) kurikulum sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu pada diri siswa (baca: kurikulum sebagai produk), 3) kurikulum sebagai proses, dan 4) kurikulum sebagai praksis. Singkatnya, kurikulum harus disusun sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan riil masyarakat.

Pada titik ini, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman yang harus dimiliki anak-anak dan/atau generasi muda dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Untuk itu, merujuk pada pandangan George A. Beauchamp¹² dalam bukunya *Curriculum Theory*, kurikulum pesantren harus didasarkan pada pembacaan prinsip-prinsip dasar pendidikan (*the basic principles of education*). Lebih jelasnya, cermati gambar berikut:



Sumber: (Beauchamp, 1986: 4)

¹¹ Smith, Mark K., *Curriculum Theory and Practice*, Dokumen [www. Tersedia di http://www.infed.org/ biblio/b-curr.htm](http://www.infed.org/biblio/b-curr.htm), hlm: 2.

¹² Beauchamp, George A., *Curriculum Theory*, 2nd edition, The KAGG Press, Illions, 1968, hlm: 7.

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam pendidikan terdapat beberapa komponen, termasuk di antaranya adalah kurikulum. Teori kurikulum sendiri tidak lain merupakan subteori dari teori pendidikan. Tiga kotak teratas (level 1) terdiri dari tiga kategori teori dasar, yaitu: teori-teori kemanusiaan, teori-teori ilmu alam dan teori-teori ilmu sosial. Tiga teori ini kemudian berkembang menjadi berbagai disiplin ilmu (level 2), seperti: arsitektur, rekayasa, pendidikan, hukum, kesehatan, dan sebagainya. Disiplin-disiplin ilmu ini mengartikulasikan otoritas dasarnya masing-masing dan memiliki “induk” sendiri-sendiri. Taruhlah ilmu *engineering* yang lahir dari ilmu alam, ilmu hukum sebagai derivasi dari ilmu sosial, dan begitu juga dengan ilmu-ilmu lainnya.

Kemudian pada level 3 merupakan subteori pendidikan saja. Pada deretan level 3 ini tidak ada korelasi dengan teori arsitektur, *engineering*, hukum ataupun kesehatan. Yang termasuk sub-teori pendidikan adalah teori administrasi, teori konseling, teori kurikulum, teori instruksional dan teori evaluasi. Namun, fokus kajian kita saat ini terletak pada teori kurikulum. Garis yang dicetak tebal pada gambar di atas untuk menggambarkan hubungan langsung (*direct connection*) antara supra dan subteori kurikulum. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa teori rekayasa, misalnya, memiliki kontribusi terhadap teori administrasi atau teori kurikulum. Namun, itu hanya kontribusi suplemen saja. Mengapa? karena semua teori pada level 3 adalah sub-sub teori pendidikan saja.

Begitu juga dengan level 4 yang meliputi: teori desain (kurikulum), teori prosedur (kurikulum) dan teori isi (kurikulum), merupakan subteori-

subteori kurikulum. Teori administrasi dan instruksional bisa jadi berpengaruh terhadap teori desain. Namun teori desain bukanlah sub-teori dari keduanya. Perlu ditambahkan, garis tebal tersebut menggambarkan bagaimana relasi teori pendidikan terhadap teori kurikulum, kemudian relasi teori kurikulum pada sub-sub teori yang ada di level 4. Ini, kata Beauchamp¹³ membuktikan bahwa teori kurikulum termasuk salah satu masalah pendidikan, *educational problem*.

Reformulasi Manajemen Dan Kepemimpinan Pesantren

Manajemen bisa diartikan sebagai suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu atau yang telah ditetapkan dengan efektif. Manajemen, sebagai suatu proses sosial, meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang, baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar lembaga-lembaga formal, atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang. Sedangkan manajer ialah seseorang yang ditempatkan dalam suatu posisi yang harus menjamin perubahan-perubahan perilaku orang lain dengan tujuan mencapai sasaran yang dipercayakan kepadanya. Manajemen merupakan seni pembimbingan kegiatan-kegiatan sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum.

Stoner¹⁴ mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk

melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Artinya, manajemen bisa dikatakan seni dalam mengatur atau mengelola suatu kegiatan, aktivitas, organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Manajemen merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya yang kegiatannya banyak terdapat pada organisasi perusahaan, bisnis kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya Durbin¹⁵ mengemukakan bahwa manajemen memberi kemudahan khusus dalam pengetahuan orang banyak secara efektif sesuai dengan tujuan dan pencapaian hasil secara bersama yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pengistilahan manajemen dan administrasi Forman dan Ryan dalam Sutisna berpendapat bahwa antara administrasi dan manajemen tidak memiliki perbedaan yang berarti, sehingga istilah tersebut dapat saja disejajarkan penggunaannya. Karena istilah administrasi dan manajemen tidak ada perbedaan menurut Forman dan Ryan maka Monroe, mengemukakan pengertian administrasi sebagai berikut:

“Educational administration is the direction, control and management of all matters pertaining to school

¹³ Beauchamp, George A., *Curriculum Theory*, 2nd edition, The KAGG Press, Illions, 1968, hlm: 3-4.

¹⁴ Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003, hlm:188-189.

¹⁵ Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003, hlm:189.

*affairs, including business administrations since all aspects of school affairs may be considered as considered as carried on for educational end".*¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dan dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen dalam lingkungan pendidikan adalah mendayagunakan berbagai sumber (manusia, sarana dan prasarana, serta media pendidikan lainnya) secara optimal, relevan, efektif dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan.

Selanjutnya Engkoswara dalam¹⁷ menjelaskan bahwa konsep administrasi pendidikan sejajar dengan konsep manajemen pendidikan (pengelolaan pendidikan). Fungsi dan ruang lingkup manajemen pendidikan diuraikan menjadi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan berkaitan dengan perumusan kebijakan kebijakan awal sebagai pedoman dalam pelaksanaan. Pelaksanaan memerlukan pengawasan karena pengawasan atau penilaian untuk mengetahui kekurangan atau kesenjangan (gap) termasuk kemajuan yang telah dicapai. Keberhasilan pengelolaan pendidikan memerlukan beberapa dukungan, terutama dukungan *human resources* yang terdiri dari kiai, ustadz/ustadzah, santri, dan wali santri; perlunya memiliki proses belajar yang berintikan

kurikulum; serta adanya waktu, fasilitas dan dana yang dibutuhkan. Kesemuanya itu mendukung upaya mengoptimalkan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Seiring dengan itu, lahirlah berbagai teori yang mengilhami kerja-kerja manajemen di lingkungan perusahaan, institusi pemerintah, lembaga-lembaga public lainnya. Perjalanan teori manajemen sejak latar belakang munculnya tidak terlepas dari manajemen dalam perspektif dunia perusahaan, namun lambat laun berkembang pada ranah-ranah yang lain, baik institusi, organisasi serta layanan publik (*public service*) lainnya, termasuk dalam lembaga pendidikan—sebagai lembaga pelayanan publik. Dengan pandangan tersebut lahirlah beberapa teori manajemen sesuai dengan masanya. Lahirnya teori-teori manajemen adalah disebabkan hubungan antara industri dengan teori manajemen dan perhatian terhadap metode, yaitu integrasi manajemen dan ilmu.

Ada sejumlah pandangan tentang tahap perkembangan teori manajemen pendidikan. Para ahli manajemen mengkalsifikasikan perkembangan teori manajemen sendiri dalam bentuk fase, ada juga berdasarkan tahap atau tahun, ada pula yang berdasarkan pendekatan.

Sedangkan dalam perspektif psikologis-sosial hubungannya dalam dunia kerja dan hubungan organisasi, menurut Marwan Asri, perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu: 1) variabel individual, mencakup faktor kemampuan dan keterampilan mental, fisik, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur, dan jenis kelamin, 2) variabel organisasi, terdiri dari faktor sumber daya yang tersedia, gaya kepemimpinan, sistem

¹⁶ Sufyarma, *Kapita Selektta Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003, hlm:189.

¹⁷ Sufyarma, *Kapita Selektta Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003, hlm. 190.

imbangan, struktur organisasi, dan desain pekerjaan, dan 3) variabel psikologis, terdiri atas beberapa faktor, berupa persepsi, sikap, kepribadian, proses belajar, dan motivasi.¹⁸

Dari pengertian tentang sistem dapat diidentifikasi bahwa sistem mempunyai makna: 1) terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya, 2) bagian-bagian yang saling berhubungan itu dapat berfungsi dengan baik secara independen secara bersama-sama, 3) berfungsinya bagian-bagian tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan umum secara keseluruhan, dan 4) suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian itu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Manajemen dipandang sebagai suatu sistem didasarkan pada asumsi bahwa organisasi merupakan sistem terbuka, tujuan organisasi mempunyai kebergantungan.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen berdasarkan sistem, mencakup: 1) manajemen berdasarkan sasaran, 2) manajemen berdasarkan teknik, 3) manajemen berdasarkan struktur, 4) manajemen berdasarkan orang, dan 5) manajemen berdasarkan informasi.

Hubungan manajemen terbuka (*open management*) pada ranah institusi pendidikan pesantren berfungsi, terutama, dalam pemecahan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision making*). Dalam hal ini pendekatan sistem dikaitkan dengan metode-metode ilmiah yang mencakup: 1) menyadari adanya masalah, 2) mengidentifikasi variabel yang relevan, 3) menganalisis dan mensistensiskan

faktor-faktor, dan 4) menentukan kesimpulan dalam bentuk program kegiatan.

Pendekatan sistem ini diperlukan dalam dunia pesantren, dimana cara-cara tradisional dalam pengelolaan kurang efektif karena semakin dunia pesantren semakin kompleks. Perubahan yang terjadi dalam organisasi pesantren semakin cepat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan pesantren juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan pendekatan sistem agar efektivitas dan efisiensi juga meningkat. Dengan demikian, manajemen dengan pendekatan sistem terbuka ini memungkinkan untuk perbaikan pengelolaan pesantren ke depan.

A. Malik Fadjar mengingatkan bahwa mengelola suatu lembaga pendidikan, seperti pesantren, bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi yang dimaksud mengelola tidak sekedar dalam pengertian "mempertahankan" yang sudah ada, tetapi melakukan pengembangan secara sistematis dan sistemik, yang mengikuti aspek ideologis (visi dan misi), kelembagaan dan langkah operasionalnya serta mencerminkan pertumbuhan (*growth*), perubahan (*change*), dan pembaruan (*reform*).

Sekedar mempertahankan, lanjut Fadjar, mungkin relatif lebih mudah untuk dilakukan. Tetapi penyikapan terhadap pendidikan yang cenderung *status quo* akan segera mendatangkan petaka bagi pesantren. Secara perlahan tapi pasti, pesantren semacam ini akan tertinggal dalam buritan sejarah, karena ketidakmampuannya mengadakan hubungan dialektis dengan zaman dan realitas yang selalu menuntut sikap transformatif. Karenanya, dalam rangka mewujudkan pesantren yang peka

¹⁸ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm: 28.

zaman perlu ditetapkan program manajemen pesantren yang meliputi empat unsur berikut: *Pertama, pesantren review*, yaitu suatu proses yang di dalamnya seluruh pihak madrasah bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas kebijaksanaan pesantren, program, pelaksanaannya serta mutu lulusannya. Melalui *pesantren review* diharapkan akan dapat menghasilkan suatu laporan yang membeberkan kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan dan prestasi pesantren serta memberikan rekomendasi untuk menyusun perencanaan strategis pengembangan pesantren pada masa-masa mendatang, tiga atau lima tahun berikutnya.

Kedua, quality assurance, yaitu sebagai jaminan bahwa proses yang berlangsung telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian diharapkan dengan proses itu akan menghasilkan *output* yang memenuhi standar pula. Untuk itu diperlukan mekanisme kontrol agar semua kegiatan yang dilaksanakan di pesantren terkondisi dalam standar proses yang ideal tadi. Dengan *quality insurance* ini pihak pengurus dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pesantrennya senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh santri-santrinya.

Ketiga, quality control, yaitu suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas *output* yang tidak sesuai dengan standar. Standar kualitas ini dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui maju mundurnya pesantren. Semua pesantren baik *salaf* maupun *khalaf* dapat melakukan *quality control*.

Keempat, bench marking, yaitu kegiatan untuk menetapkan suatu standar, baik proses maupun hasil yang akan dicapai pada periode tertentu. Untuk kepentingan praktis standar tersebut direfleksikan dari realitas yang ada seperti dalam hal perilaku mengajar ustadz/ustadzah, standar yang ditetapkan adalah dengan merefleksikan salah seorang guru yang dikenal (*internal bench marking*), baik dalam mengajarnya, demikian pula dalam hal standar kualitas pendidikan, direfleksikan dari suatu pesantren sekolah yang baik (*external bench marking*).

Penutup

Pendidikan pesantren menjadi penting dalam bidang sumber daya Ummat, dalam hal ini profetik pesantren menjadi final point dalam pengembangan pesantren ke depan, selain itu profetik harus dikedepankan dalam berbagai manajemen pesantren sehingga pembedayaan umat dalam bidang pesantren menjadi masif dan terarah.

Daftar Pustaka

- A'la, Abd. "Pengembangan Pendidikan Pesantren (Telaah Teologis terhadap Kurikulum dan Metode)," *KOMPAS*, 11 September, 2000
- Abdullah, M. Amin. "Perspektif *Link and Match* Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan Agama Islam: Rekonstruksi atas Tinjauan Metodologi Pembudayaan Nilai-nilai Keagamaan," dalam Musleh Usa dan Aden Wijaya (ed.), *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997

- Atmodiwirio, Soebagio. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta, PT. Ardadizya Jaya, 2000
- Azra, Azyumardi. *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium*, Ciputat: Kalimah, 2001
- Beauchamp, George A., *Curriculum Theory*, 2nd edition, The KAGG Press, Illions, 1968
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, Bandung, Mizan, 1999
- Dahlan, Muhidin M. "Sosialisme Religius": Mendayung di antara Sosialisme dan Kapitalisme," dalam *Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat?*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001
- Darus, Baharuddin. "Pengembangan Kajian Ekonomi Islami pada IAIN di Abad ke-21" dalam Syahrin Harahap (ed), *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998
- Depag RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta, 2003
- Djuwariyah, "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Islam," Yogyakarta: Jurnal El-Tarbawi No. 1 Vol. I, 2008
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Effendi, Bachtiar. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999
- Imam Suprayogo, *Reformulasi Visi Pendidikan Islam*, Malang: STAIN Press, 1999
- Kuntowidjojo, *Paradigma Islam*, Bandung: Mizan, 1991,
- Langgulong, Hasan, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Mas'ud, Abdurrahman. *Sejarah dan Budaya Pesantren*, dalam Ismail SM, et.al., *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Pelajar, 2002
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi: Resistensi Tradisional Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Pip. "Santri Tidak Hanya Menguasai Kitab Kuning Saja," Dokumen www. Tersedia di www.pondokpesantren.net, [Diakses 1 September 2010]
- Prasodjo, Soedjoko. *Profil Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Rahardjo, Mudjia (ed.), *Quo Vadis Pendidikan Islam Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*, Malang: UIN Malang Press, 2006
- Smith, Mark K., *Curriculum Theory and Practice*, Dokumen www. Tersedia di <http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm>
- Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003
- Suprayago, Imam. *Kiai dan Politik di Pedesaan (suatu kajian tentang Variasi dan bentuk Keterlibatan Politik Kiai)*.

Desertasi Doktor di Universitas
Airlangga. 1997.

Syaodih, Sukmadinata Nana.
*Pengembangan Kurikulum, Teori dan
Praktek*, Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2002

Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan
Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
2002

Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan
Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2010
www.pondokpesantren.net, [Diakses 1
September 2010]

